



Kementerian  
Kelautan dan Perikanan

# 2024

---

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

## **BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

Jl. A.Yani 29,4 Guntung Manggis,  
Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,  
Kalimantan Selatan  
70721

## KATA PENGANTAR

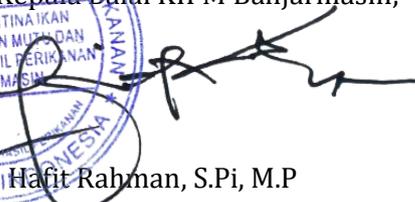
Laporan Kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin (LKj Balai KIPM Banjarmasin) tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Banjarmasin dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024. Secara umum, padatahun 2024 beberapa target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai dengan baik.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Banjarbaru, 22 April 2024  
Kepala Balai KIPM Banjarmasin,

  
Hafit Rahman, S.Pi, M.P



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
PENDAHULUAN .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1 LATAR BELAKANG .....	5
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	6
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA .....	7
BAB II AKUNTABILITAS KERJA .....	8
2.1 CAPAIAN KINERJA .....	8
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI .....	10
2.3 REALISASI ANGGARAN .....	26
PENUTUP .....	27
BAB III PENUTUP .....	27
3.1 KESIMPULAN .....	27
3.2 REKOMENDASI .....	28



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP Banjarmasin.....	7
Gambar 2. Dashboard capaian IKU/IKM pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja .....	8
Gambar 3. Publikasi nilai SKM pada social media instagram .....	16

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BPPMHKP Banjarmasin Tahun 2024 .....	9
Tabel 2. Target dan Realisasi IKU 1 pada Tahun 2024.....	11
Tabel 3. Target dan Realisasi IKU 2 pada Tahun 2024.....	12
Tabel 4. Target dan Realisasi IKU 3 pada Tahun 2024.....	13
Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 4 pada Tahun 2024.....	14
Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 5 pada Tahun 2024.....	15
Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 6 pada Tahun 2024.....	16
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU 7 pada Tahun 2024.....	17
Tabel 9. Target dan Realisasi IKM 8 pada Tahun 2024.....	18
Tabel 10. Target dan Realisasi IKM 9 pada Tahun 2024 .....	19
Tabel 11. Target dan Realisasi IKM 10 pada Tahun 2024 .....	20
Tabel 12. Target dan Realisasi IKM 11 pada Tahun 2024 .....	21
Tabel 13. Target dan Realisasi IKM 12 pada Tahun 2024 .....	22
Tabel 14. Target dan Realisasi IKM 13 pada Tahun 2024 .....	23
Tabel 15. Target dan Realisasi IKM 14 pada Tahun 2024 .....	23
Tabel 16. Target dan Realisasi IKM 15 pada Tahun 2024 .....	24
Tabel 17. Target dan Realisasi IKM 16 pada Tahun 2024 .....	25
Tabel 18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2024.....	26
Tabel 19. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada Tahun 2024 .....	26

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin tahun 2024 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Balai KIPM Banjarmasin telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Periode Tahun 2024.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar **112.48%** Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU/IKM) Balai KIPM Banjarmasin yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan IKU/IKM Balai KIPM Banjarmasin berjumlah 16 (enam belas) yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu :
  - a. Pengendalian Mutu
  - b. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
  - c. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP
2. Uraian IKU/IKM yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:

## **Kegiatan 1. Pengendalian Mutu**

IKU1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan I dan II (Realisasi melebihi target)
IKU2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi) – target dan capaian terealisasi
IKU3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan III.

- IKU 4                      Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk) – Realisasi memenuhi target pada triwulan III
- IKU 5                      UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI) – Realisasi 10 upi belum memenuhi target sampai dengan triwulan IV.

### **Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan**

- IKU6                      Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai) - Realisasi melebihi target
- IKU7                      Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) – target dan capaian sudah terealisasi pada triwulan I.

### **Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP**

- IKM8                      Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit) - target tahunan
- IKM9                      Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) –target semesteran.
- IKM 10                    Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) – target tahunan
- IKM 11                    Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan
- IKM12                    Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – Realisasi sesuai dengan target.
- IKM 13                    Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) – target semesteran.
- IKM 14                    Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) – target tahunan
- IKM15                    Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan

IKM16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan

Pagu anggaran sebesar Rp. 6.173.055.000,- (*enam milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah*). Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan I Tahun 2024 mencapai Rp 1.460.129.563,- (*satu milyar empat ratus enam puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*) atau sebesar 23,65 %.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsi padatahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP Banjarmasin. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP Banjarmasin serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP Banjarmasin. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala BPPMHKP Banjarmasin dibantu oleh 1 Pejabat Struktural yaitu Kepala Sub Bagian Umum (Tim Kerja Dukungan Manajerial), dan 3 Tim Kerja yaitu Pengendalian Mutu, Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan, dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung BPPMHKP Banjarmasin sejumlah 18 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 6 pegawai fungsional inspektur mutu, 4 pegawai fungsional asisten inspektur mutu, 1 pegawai fungsional pranata keuangan APBN, 1 pegawai analis pengelola keuangan APBN ahli muda, 1 pegawai fungsional umum penelaah teknis kebijakan, 1 pegawai fungsional penganidministrasi umum, dan 2 Pegawai PPPK serta dibantu oleh 11 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi Balai KIPM Banjarmasin dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Banjarmasin

### 1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

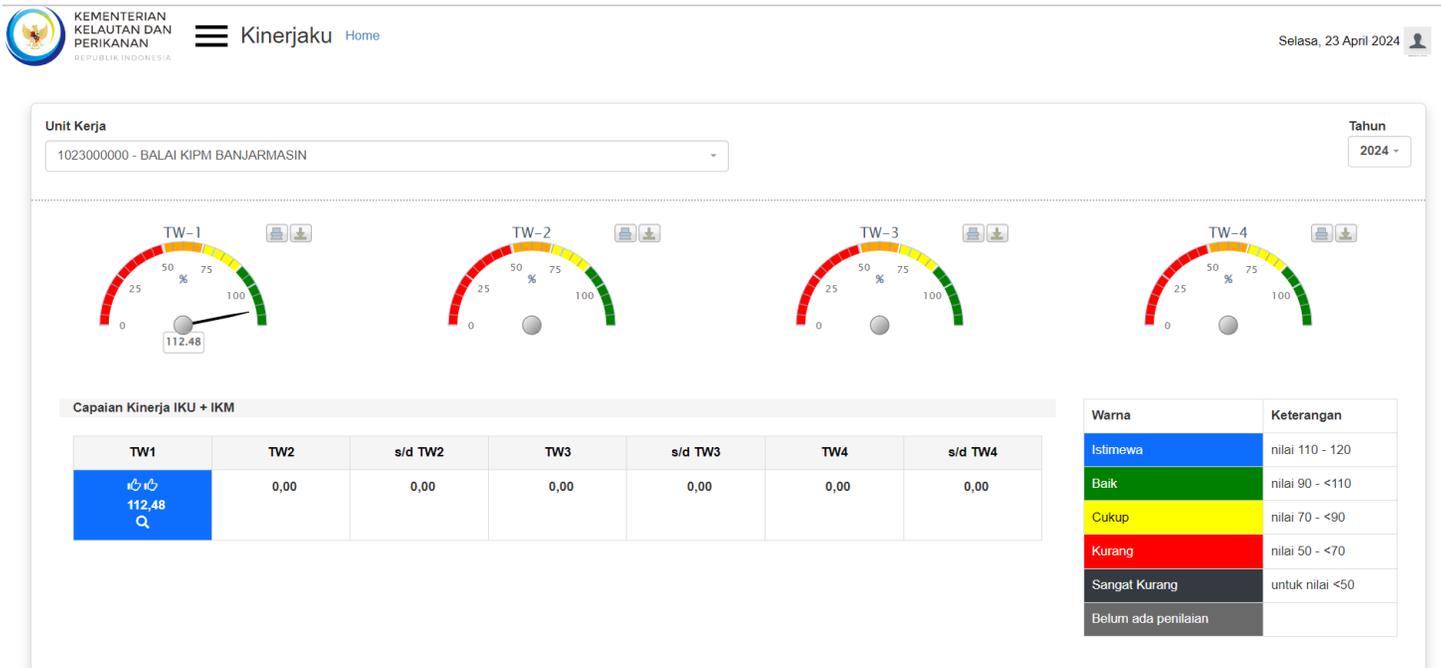
# BAB 2

## AKUNTABILITAS KINERJA

### BAB II AKUNTABILITAS KERJA

#### 2.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan I tahun 2024 masuk dalam kategori “Istimewa”, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **112.48%** berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).



Gambar 2. Dashboard capaian IKU/IKM pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin TW.I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	TARGET TW I	REALISASI TW.I
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>						
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat)	10	0	1
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi)	3	3	3
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	5	0	0
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk)	17	2	2
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	12	1	1
<b>Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>						
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)	84	84	98,65
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	3	0	0
<b>Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP</b>						
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang	8	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	75	0	0

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	TARGET TW I	REALISASI TW.I
baik lingkup BPPMHKP	9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)		86	0	0
	10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)		82	0	0
	11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)		100	0	0
	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)		80	80	100
	13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)		93,76	0	0
	14	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)		82	0	0
	15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)		80	0	0
	16	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)		80	0	0

## 2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

### **Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.**

Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing diperoleh dari pencapaian pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.

**Kegiatan 1. Pengendalian Mutu****IKU 1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Sertifikat CPIB di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/ Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB.

Realisasi indikator Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BPPMHKP Banjarmasin sudah terealisasi sejumlah 1 sertifikat pada triwulan I 2024 dari target tahunan sejumlah 10 sertifikat yang seharusnya dilaksanakan mulai triwulan II.

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi IKU 1 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat)	10	5	-	10	10	10	1	10	10	57

Tabel 2. Target dan Realisasi IKU 1 pada Tahun 2024

**IKU 2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi)**

Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP) berkontribusi dalam implementasi Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat bersama dengan beberapa instansi terkait antara lain seperti Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, BP-POM, Universitas Lambung Mangkurat, Pemerintah Kabupaten/Kota dll;

Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik dalam rangka Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Residu dan Bahan Berbahaya di lingkungan perairan, Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah

pasarmodern, pasar tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik.

Pada tahun 2024, telah ditetapkan target sebanyak 3 (tiga) lokasi yang dilaksanakan untuk 2 periode. Untuk periode 1 telah dilaksanakan pada triwulan I pada bulan Maret. Lokasi pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi IKU 2 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi)	1	1	1	1	3	3	3	100	3	3

Tabel 3. Target dan Realisasi IKU 2 pada Tahun 2024

### **IKU 3. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI)**

Traceability atau Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.

Mengacu pada Peraturan Kepala BPPMHKP No. 170/Per BPPMHKP/2019 tentang Penerapan Sistem Traceability (Ketertelusuran) di UPI, bahwa UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Melalui traceability/ketertelusuran kemampuan untuk melacak (*tracing*) dan mengikuti jejak (*tracking*) produk pada seluruh mata rantai produksi, pengolahan, serta distribusi sehingga dapat diketahui dari mana asal bahan baku (*backward*), bagaimana produk ditangani disetiap tahapannya hingga kemana produk didistribusikan (*forward*). Surat Keterangan Penerapan Sistem Traceability Unit Pengolahan Ikan (UPI) diberikan kepada UPI yang telah menyusun program dan prosedur sistem ketertelusuran dan telah menerapkannya dan UPI telah membuktikan penerapan sistem traceability dengan simulasi penerapannya pada

saat dilakukan evaluasi/inspeksi sistem traceability dengan masa berlaku surat keterangan tersebut adalah 2 (dua) tahun dari tanggal diterbitkan.

Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* (ketertelusuran) melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Kegiatan traceability dilaksanakan oleh inspektur mutu Balai KIPM Banjarmasin berdasarkan SOP yang berlaku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan sertifikasi HACCP. Pelaksanaan jadwal dan UPI yang dilakukan evaluasi *traceability* mengikuti program Pusat Pengendalian Mutu - BPPMHKP.

Target Indikator unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) pada tahun 2024 sebanyak 5 UPI, belum dilaksanakan pada triwulan I ini, sehingga realisasi indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI) mencapai 0% dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 5.

**Tabel 4**  
**Target dan Realisasi IKU 3 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	-	5	5	3	5	5	0	0	5	100

Tabel 4. Target dan Realisasi IKU 3 pada Tahun 2024

#### **IKU 4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk)**

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pengukuran diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP

$$A = B + C$$

Keterangan :

B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi

Pada tahun 2024, telah ditetapkan target Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin sebanyak 17 (tujuh belas) produk. Tahun 2024 realisasi pada indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk) sebanyak 2 produk dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 17 sehingga capaiannya mencapai 11,76 %.

**Tabel 5**  
**Target dan Realisasi IKU 4 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Produk)	11	17	16	17	17	17	2	11,76	17	111

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 4 pada Tahun 2024

#### **IKU 5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)**

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang disertifikasi HACCP pada tahun 2024. Realisasi indikator pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 1 UPI atau 8,33% dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 12 UPI.

**Tabel 6**  
**Target dan Realisasi IKU 5 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	-	-	-	11	12	12	1	8,33	12	10

Tabel 6.Target dan Realisasi IKU 5 pada Tahun 2024

### **Kegiatan2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan**

#### **IKU 6. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/40> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT KKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Balai KIPM Banjarmasin mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil yang ingin dicapai dari Survei Kepuasan Masyarakat adalah perbaikan pelayanan kepada masyarakat melalui Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna dan tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2024 nilai SKM Balai KIPM Banjarmasin 98,65 dengan kategori “SANGAT BAIK”, Realisasi Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik (nilai) lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2024 sebesar 98,65 atau melebihi target triwulan yang ditetapkan yaitu 84.

**Tabel 7**  
**Target dan Realisasi IKU 6 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)	-	-	-	84	84	84	98,65	117	84	100

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 6 pada Tahun 2024



Gambar 3. Publikasi nilai SKM pada social media instagram

### **IKU 7. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)**

Melaksanakan Verifikasi *Quality Assurance* (Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan/Standar di lokasi Kawasan/Kampung Budidaya. Indikator kegiatan ini adalah jumlah lokasi yang telah dilakukan Verifikasi *Quality Assurance* di lokasi/Kawasan Budidaya.

Ruang lingkup Kegiatan Verifikasi *Quality Assurance* meliputi :

1. Sosialisasi *Quality Assurance* dan Pembentukan Pokja *Quality Assurance*
2. Bimbingan Teknis Petugas *Quality Assurance*
3. Pelaksanaan Verifikasi *Quality Assurance*
4. Pelaporan
5. Penyampaian Rekomendasi ke Menteri

Target indikator lokasi usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) lokasi tidak terdapat target dan belum terealisasi pada triwulan I.

**Tabel 8**  
**Target dan Realisasi IKU 7 pada Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	-	-	-	-	3	3	0	0	3	100

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU 7 pada Tahun 2024

### **Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP**

#### **Sasaran Kegiatan 3 . Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP**

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP diperoleh dari pencapaian Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Indeks Profesionalitas ASN lingkup

BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks), Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Banjarmasin, Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai), Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai), Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%).

**IKM 8. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (unit)**

Pembangunan Zona Integritas pada Balai KIPM Banjarmasin tetap dilaksanakan sesuai amanat yang telah diberikan semenjak tahun tahun sebelumnya, meskipun sampai dengan bulan maret 2024 belum terdapat evaluasi dari tim inspektorat jenderal KKP ataupun dari internal Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini juga termasuk dalam IKM yang mempunyai target pada akhir tahun 2024.

Pemenuhan Dokumen Pembangunan ZI untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tetap dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab dan anggota tim dari masing-masing pengungkit.

**Tabel 9**  
**Target dan Realisasi IKM 8 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (unit)	-	-	-	1	75	75	0	0	75	100

Tabel 9. Target dan Realisasi IKM 8 pada Tahun 2024

### **IKM 9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Realisasi indikator indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) bersifat semesteran, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi hasil capaian indeks seperti pejabat struktural yang telah selesai mengikuti Diklat Pimpinan dan masih terdapatnya ASN dengan kualifikasi Pendidikan SMU/SMK sederajat. Dalam IKM Tahun 2024 Target direncanakan pada setiap semesteran, untuk triwulan I ini capaian masih kosong.

**Tabel 10**  
**Target dan Realisasi IKM 9 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	60	72	73	83	84	86	0	0	86	100

Tabel 10. Target dan Realisasi IKM 9 pada Tahun 2024

### **IKM 10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yakni "Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut

ditindak lanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan".

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (*Self Assesment*) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

Hasil evaluasi/Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (*Rapid Assesment*) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja, masih terdapat beberapa kekurangan terkait redaksi pada dokumen dokumen SAKIP Balai KIPM Banjarmasin yang disampaikan baik melalui Gdrive atau Aplikasi ESR Menpan.

Penilaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan (bobot 30%), kesesuaian (bobot 30%) dan ketercapaian (bobot 40%). Target nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 adalah 82 dan akan dilakukan penilaian Mandiri oleh Tim BPPMHKP pada akhir Tahun Anggaran 2024 sehingga untuk triwulan I masih belum terdapat capaian.

**Tabel 11**

**Target dan Realisasi IKM 10 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin	85	85	85	85	85	82	0	0	82	100

Tabel 11. Target dan Realisasi IKM 10 pada Tahun 2024

#### **IKM 11. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada

empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Formulasi Penyelesaian Temuan BPK BPPMHKP adalah :

Penyelesaian Temuan atas laporan keuangan TA.2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan X 100  
Realisasi rilltahun2024

Keterangan:

Persentase penyelesaian temuan atas laporan keuangan TA.2024 (Audited) target 100%

Dengan target Tahunan, Penyelesaian Temuan BPK BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin ini dapat terealisasi 100 % tanpa nilai temuan dari BPK sampai akhir Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 12**  
**Target dan Realisasi IKM 11 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	1%	1%	-	≤1	100	100	0	0	≤0,5%	100

*Tabel 12. Target dan Realisasi IKM 11 pada Tahun 2024*

**IKM 12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin (%)**

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2024 mencapai 100% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 80. Pada Tahun 2024, target indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan I adalah target 80% dengan realisasi sebesar 100%, karena sampai Bulan Maret belum ada Pengawasan Internal dari Inspektorat Jenderal KKP.



**Tabel 13**  
**Target dan Realisasi IKM 12 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin (%)	-	82	65	70	75	80	100	100	80	100

Tabel 13. Target dan Realisasi IKM 12 pada Tahun 2024

### **IKM 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri dari (Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Capaian Output), pada tahun 2024 masih terdapat kelemahan pada indikator Deviasi halaman III DIPA terkait dengan penyampaian dan pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 adalah 93,76. Realisasi indikator nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Banjarmasin bersifat semesteran.

**Tabel 14**  
**Target dan Realisasi IKM 13 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	-	88	89	89	93,75	93,76	0	0	93,76	100

Tabel 14. Target dan Realisasi IKM 13 pada Tahun 2024

#### **IKM 14. Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART KEMENKEU dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, Nilai sangat dipengaruhi dengan efisiensi penggunaan anggaran yang sebenarnya berbanding terbalik dengan kewajiban satker untuk peningkatan capaian anggaran agar serapan anggaran bisa maksimal.

Target yang ditetapkan pada indikator nilai kinerja anggaran Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 adalah 82 dan pada periode triwulan I 2024 belum ada realisasi karena target realisasinya bersifat tahunan.

**Tabel 15**  
**Target dan Realisasi IKM 14 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	87	88	86	81	82	82	0	0	82	100

Tabel 15. Target dan Realisasi IKM 14 pada Tahun 2024

### **IKM 15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu : Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%), Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Target yang ditetapkan pada indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 adalah 77,5 dan capaian realisasi Tahun 2024 akan dicapai pada akhir tahun 2024.

**Tabel 16**  
**Target dan Realisasi IKM 15 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	-	-	-	75	77,5	80	0	0	80	100

Tabel 16. Target dan Realisasi IKM 15 pada Tahun 2024

### **IKM 16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%), tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%), tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun

2017-2021 (bobot 20%), pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (bobot 25%) dan Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu dengan (bobot 20%).

Target yang ditetapkan pada indikator Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN BPPMHKP lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 adalah 77,5 dan capaian realisasi Tahun 2024 akan dicapai pada akhir tahun 2024.

**Tabel 17**  
**Target dan Realisasi IKM 16 pada TW I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun					TW I Tahun 2024			Renstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	-	-	-	75	77,5	80	0	0	80	100

Tabel 17. Target dan Realisasi IKM 16 pada Tahun 2024

### 2.3 REALISASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 6.173.055.000,- (*enam milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah*). Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan I Tahun 2024 mencapai Rp. 1.460.129.563,- (*satu milyar empat ratus enam puluh juta seratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*) atau sebesar 23,65 %.

Alokasi anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah Rp 6.173.055.000,- (*enam milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah*). Anggaran ini terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp 6.149.115.000,- (*enam milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah*) dan PNPB sebesar Rp 23.940.000,- (*dua puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*). Sampai Triwulan I Tahun 2024 realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin mencapai Rp 1.460.129.563,- (*satu milyar empat ratus enam puluh juta seratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*) atau sebesar 23,65 %.

Rekapitulasi penyerapan anggaran BPPMHKP T.A 2024 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 18 dan Tabel 19.

**Tabel 18**  
**Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2024**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Pegawai	3.489.184.000	951.228.192	2.537.955.808	27.26
2	Barang	2.683.871.000	508.901.371	2.174.969.629	18.96
3	Modal	0	0	0	0
	TOTAL	6.173.055.000	1.460.129.563	4.712.925.437	23.65

Tabel 18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2024

**Tabel 19**  
**Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada Tahun 2024**

No	Kode/Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	3989/ Pengendalian Mutu	260.750.000	87.801.548	172.948.452	33.67
2	3990/ Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	206.500.000	0	206.500.000	0
3	3987 / Dukungan Manajemen Internal	5.705.805.000	1.372.328.015	4.333.476.985	24.05
	TOTAL	6.173.055.000	1.460.129.563	4.712.925.437	23.65

Tabel 19. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada Tahun 2024

# BAB 3

---

## *PENUTUP*

---

### BAB III PENUTUP

#### 3.1 KESIMPULAN

Dari capaian-capaian yang telah dilaksanakan pada kinerja triwulan I Tahun 2024 juga menjawab beberapa rekomendasi permasalahan dan kendala pada triwulan sebelumnya, diantaranya : Telah dilakukan Update berkelanjutan skema Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai jadwal dari Kementerian Keuangan RI secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan rencana pada Halaman III DIPA. Serta melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran yang dilakukan setiap Bulan bertepatan dengan Rapat Bulanan oleh masing masing penanggung jawab kegiatan dan keuangan Balai KIPM Banjarmasin. Dan juga melakukan revisi kelebihan perkiraan belanja pegawai agar realisasi capaian belanja dapat terpenuhi sesuai Target Tahunan.

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Banjarmasin triwulan I Tahun 2024 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Balai KIPM Banjarmasin pada periode pertama tahun anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Terhadap capaian IKU dan IKM tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU dan IKM Balai KIPM Banjarmasin yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I tahun 2024, antara lain:

- i) Masih harus selalu update Rencana Penarikan Dana yang mempengaruhi Indikator deviasi Halaman III DIPA seiring dengan perubahan nomenklatur kelembagaan;
- ii) Dengan berubahnya nomenklatur kelembagaan maka jumlah personil pada Balai KIPM Banjarmasin tersisa 18 ASN ini sedikit menjadi hambatan dalam pencapaian program kegiatan yang diamanahkan atau yang diperjanjikan”.

### 3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan I tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- i) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan target IKU dan IKM serta rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dari masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024.
- ii) Tim Perencanaan agar melakukan Update skema Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk setiap triwulan di Tahun 2024 sesuai jadwal dari Kementerian Keuangan RI agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan Rencana pada Halaman III DIPA dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan Kementerian Keuangan;
- iii) Memaksimalkan personil ASN yang ada untuk kelancaran program kegiatan dengan harapan pada pengadaan ASN baik itu PNS dan PPPK Balai KIPM Banjarmasin mendapatkan formasi tambahan ASN yang dapat memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan.